

BPKH *News*

**Catatan Ramadan dan Idulfitri
Dari Pegiat Investasi Haji
Di Mekkah**

Hal 03

**Ketika Nasi Opor
Menembus Tanah Suci**

Hal 19

**Balik Kerja Bareng BPKH
Kembali Hadir untuk
25.000 Pemudik**

Hal 07



**BPKH Perkuat Dana
Investasi Hingga
Ke Luar Negeri**

Hal 13

**EID MUBARAK, TEBAR MANFAAT
MENGUATKAN UMAT**



#Semua
BisaHaji

 **BPKH**
Badan Pengelola Keuangan Haji

Terima Kasih Haji Muda Atas Dukungannya

BPKH Raih Penghargaan
PR Indonesia Award 2025



TERPOPULER DI MEDIA ONLINE DAN MEDIA SOSIAL
PR INDONESIA AWARDS 2025 & MAJALAH INTERNAL
JANATINI HAJACAM & SOS SDAWA AISIANDEI JAJ

MENJAGA FITRAH, MENGUATKAN PELAYANAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, bulan Syawal kembali hadir sebagai penutup indah dari serangkaian ibadah Ramadan. Kita patut bersyukur atas segala nikmat kesehatan, kekuatan, dan keimanan yang terus Allah limpahkan. Di bulan yang fitri ini, izinkan saya mewakili keluarga besar BPKH mengucapkan Selamat Idulfitri 1446 H, mohon maaf lahir dan batin.

Edisi kali ini menghadirkan sebuah perspektif yang sangat berharga: kisah Ramadan dan Idulfitri di Tanah Suci dari salah satu pegawai BPKH yang sedang menjalankan penugasan di Arab Saudi. Melalui narasi yang hangat dan reflektif, kita diajak menyelami nuansa Ramadan yang berbeda, sekaligus menyadari bahwa ruh ibadah dan nilai-nilai fitrah harus tetap kita jaga di mana pun kita berada.

Dalam semangat yang sama, BPKH terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Melalui BPKH Limited, kami memperkenalkan bumbu pasta khas Indonesia untuk dapur-dapur katering di Arab Saudi, guna menjaga cita rasa masakan nusantara tetap hadir di tengah perjalanan spiritual para tamu Allah. Ada 22 jenis bumbu, mulai dari rendang hingga balado, yang kini memperkaya dapur 76 penyedia katering haji.

Tak hanya itu, 60 unit bus baru juga telah resmi diluncurkan untuk mendukung mobilitas jamaah haji dan umrah. Sebanyak 35 unit di antaranya merupakan hasil investasi melalui skema kerja sama operasional dengan mitra lokal di Arab Saudi. Upaya ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami dalam meningkatkan kualitas layanan di lapangan.

BPKH juga terus memperkuat sinergi strategis di dalam negeri. Salah satunya adalah kolaborasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kami yakini akan menjadi mitra penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, memperluas edukasi kepada umat, dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji yang transparan dan amanah.

Alhamdulillah, segala ikhtiar dan kerja keras yang dilakukan bersama seluruh insan BPKH mulai membawa hasil. Pada ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2025, BPKH meraih dua penghargaan: Lembaga Negara Terpopuler di Media Sosial dan Online, serta Bronze Winner untuk kategori Majalah Internal. Ini bukan hanya pencapaian komunikasi, tapi juga cerminan keterbukaan dan semangat berbagi informasi yang selama ini terus kami rawat.

Akhir kata, semoga edisi kali ini bisa menjadi jendela inspirasi, memperkuat kebanggaan, dan meneguhkan semangat kita dalam mengelola keuangan haji secara profesional, transparan, dan menyeha terakan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Fadlul Imansyah

Kepala Badan Pelaksana
Badan Pengelola Keuangan Haji





7 BALIK KERJA BARENG BPKH KEMBALI HADIR UNTUK 2.500 PEMUDIK

“Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 merupakan wujud komitmen BPKH dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat.”



1 BPKH LIMITED PERKENALKAN BUMBU PASTA KHAS INDONESIA UNTUK KATERING JEMAAH HAJI DI ARAB SAUDI

BPKH RAIH DUA PENGHARGAAN PUBLIC RELATION INDONESIA AWARD 2025



9

BPKH BERSINERGI DENGAN PP MUHAMMADIYAH, KUATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI YANG BERKEADILAN

“Selain untuk menciptakan ekosistem haji yang berkeadilan, penguatan sistem juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada khususnya umat islam yang akan menitipkan dana haji mereka ke BPKH,”

CATATAN RAMADAN DAN IDULFITRI DARI PEGIAT INVESTASI HAJI DI MEKKAH

3



BPKH LIMITED LUNCURKAN 60 UNIT BUS BARU UNTUK LAYANAN HAJI DAN UMROH

6



BPKH TEGASKAN DANA HAJI AMAN DAN TRANSPARAN, NILAI MANFAAT 2024 LAMPAUI TARGET

11



BPKH DISTRIBUSIKAN 152,4 JUTA SAR UNTUK BIAYA HIDUP JEMAAH HAJI 2025

12





13 BPKH PERKUAT INVESTASI DANA HINGGA KE LUAR NEGERI



17 BPKH MEMFASILITASI UMKM GOES TO HAJJ UNTUK PENDAFTARAN HAJI DAN EKSPOR RENDANG KE TANAH SUCI



KETIKA NASI OPOR MENEMBUS TANAH SUCI

19



21 HALAL BI HALAL BPKH



DANA HAJI TEMBUS RP171 TRILIUN, BPKH GELAR SOSIALISASI DI BANDUNG

23



27 BPKH PERKUAT KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI DAN KOMITMEN PADA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) MENGIRIMKAN 101 DA'I UNTUK MEMPERKUAT SYIAR ISLAM DI DAERAH 3T

29



30 LAUNCHING BERKAH RAMADAN BPKH 2025



HAJI 2025, MOMEN PERTAMA MELIHAT MASJIDIL HARAM TANPA BAYANG-BAYANG KONSTRUKSI

31



BPKH LIMITED

Perkenalkan Bumbu Pasta Khas Indonesia untuk Katering Jemaah Haji di Arab Saudi

BPKH Limited, anak perusahaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), berupaya meningkatkan kualitas makanan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Untuk musim haji 1446 H (2025), BPKH Limited telah bekerja sama dengan 76 dapur penyedia katering jemaah haji Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya ini, BPKH Limited memperkenalkan 22 jenis bumbu khas Indonesia dalam bentuk pasta. Bumbu-bumbu ini, termasuk rendang, balado, dan gulai, bertujuan untuk menjaga cita rasa otentik masakan Indonesia dan meningkatkan efisiensi proses memasak.

BPKH Limited mengadakan acara pengenalan bumbu pasta tersebut pada Senin (24/02) di Kantor Urusan Haji Jeddah.

Acara ini juga mencakup penandatanganan kontrak dengan perwakilan dapur katering di Mekkah dan Madinah, serta beberapa importir Arab Saudi.

Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono menyatakan bahwa penggunaan bumbu pasta akan membantu penyedia katering menjaga keaslian rasa masakan Indonesia. "Dengan penggunaan bumbu pasta, para penyedia katering dapat menjaga keaslian rasa khas Nusantara. Ini juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan standar kualitas kuliner jemaah haji Indonesia," ujar Sidiq Haryono

Para chef dari dapur di Mekkah menyambut baik inisiatif ini, yang akan membuat persiapan makanan lebih cepat dan efisien.

Inisiatif BPKH Limited ini mendapat dukungan dari BPKH, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Haji Jeddah, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Diharapkan bahwa pengenalan bumbu ini akan meningkatkan kualitas makanan dan memberikan pengalaman kuliner yang lebih baik bagi jemaah haji Indonesia.



BPKH RAIH DUA PENGHARGAAN PUBLIC RELATION INDONESIA AWARD 2025



مكتب شؤون الحجاج

ة



CATATAN RAMADAN DAN IDULFITRI DARI SEORANG PEGIAT INVESTASI HAJI DI MEKKAH

Saat gema takbir berkumandang di seluruh pelosok negeri, sebagian dari kita merayakan Idulfitri di kampung halaman, dikelilingi keluarga dan semerbak aroma opor ayam. Namun, di balik hiruk-pikuk lebaran di tanah air, ada juga yang merayakan kemenangan Ramadan dari tempat yang jauh—tempat yang menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam: Mekkah.

Adalah Zoehelmy, seorang *Senior Manager* di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang kini tengah menjalani penugasan luar negeri di Mekkah, Arab Saudi. Sejak Mei tahun lalu, ia menjadi bagian dari sejarah awal pengembangan anak usaha BPKH di Tanah Suci: BPKH Limited. “Saya ditugaskan sebagai bagian dari awal langkah BPKH Limited,” ujar Pak Helmi. “Sekarang ini, aktivitas kami banyak berfokus di Mekkah karena mayoritas waktu

jamaah h a j i
j u g a

dihabiskan di sini.”

Ramadan yang Terbalik

Jika Ramadan di Indonesia identik dengan *ngabuburit*, pasar takjil, dan sahur bersama keluarga, maka suasana Ramadan di Mekkah menghadirkan pengalaman yang benar-benar berbeda. “Kehidupan selama Ramadan di sini seperti terbalik. Aktivitas baru dimulai setelah Zuhur dan berlangsung sampai menjelang sahur,” cerita Pak Helmi. “Meeting dengan mitra pun dijadwalkan malam hari, paling awal jam 10 malam, bahkan ada yang mulai jam 2 dini hari.”

Pola hidup malam hari ini pun memengaruhi ritme biologis secara drastis. Kota terasa hidup saat gelap, dan lengang



saat matahari bersinar. "Ini sangat memengaruhi. Bahkan ketika Ramadan selesai, ritme itu masih terbawa hingga Idulfitri," tambahnya.

Idulfitri di Antara Warga Dunia

Berlebaran di Tanah Suci tentu menjadi pengalaman spiritual tersendiri. Namun, bukan berarti bebas dari tantangan. "Saya salat Id di masjid sekitar tempat tinggal. Di Mekkah, sangat sulit mencari parkir. Bahkan ada yang salat di tengah jalan karena saking penuhnya," ungkapnya. "Itu pelajaran penting, tahun depan lebih baik tidak bawa kendaraan kalau mau salat Id."

Meski jauh dari keluarga, Zoehelmy tidak merasa sendiri. Suasana kebersamaan tetap terjaga, terutama saat berkumpul dengan sesama warga negara Indonesia. "Justru suasana lebaran Indonesia-nya terasa saat berkumpul dengan sesama WNI. Ada yang membuat kue, memasak makanan khas. Itu mengobati rasa rindu akan suasana tanah air," kenangnya.

Sementara itu, dari sisi budaya lokal, Idulfitri di Arab Saudi tidak banyak diwarnai oleh kegiatan seperti *open house* atau silaturahmi besar-besaran. Tradisi lebih bersifat privat dan kekeluargaan.

Refleksi yang Membumi

Di balik segala dinamika Ramadan dan Idulfitri di negeri orang, ada pelajaran berharga yang tak ternilai. "Idulfitri bukan sekadar hari kemenangan. Ia adalah momen untuk benar-benar kembali ke fitrah. Artinya, kita kembali seperti bayi—bersih, jujur, tanpa amarah, tanpa hawa nafsu," ujar Zoehelmy dengan nada reflektif.

Ia juga menyinggung soal fenomena konsumsi berlebih yang kerap terjadi justru saat berbuka. "Kadang kita menahan lapar sepanjang hari, tapi saat berbuka justru berlebihan. Padahal, yang diuji bukan hanya lapar, tapi juga

pengendalian diri," katanya.

Menurutnya, yang paling penting adalah menjaga semangat Ramadan agar terus hidup meskipun bulan suci telah berlalu. "Bukan hanya ibadah formal, tapi juga ibadah hati: mengendalikan amarah, rasa iri, keinginan berlebihan. Itulah sejatinya kembali ke fitrah."

Dari Mekkah, kota yang tak pernah tidur selama Ramadan, Pak Helmi membagikan cerita yang menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa fitrah bukanlah sesuatu yang hanya dirayakan, tapi perlu dijaga dalam laku sehari-hari. Bahwa kemenangan sesungguhnya adalah ketika kita mampu mempertahankan kedamaian batin, bahkan jauh dari rumah, di tengah keramaian dunia.





BPKH LIMITED Luncurkan 60 Unit Bus Baru untuk Layanan Haji dan Umrah

BPKH Limited, sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan bagi jemaah haji dan umrah, secara resmi meluncurkan 60 unit bus baru, di mana 35 di antaranya merupakan investasi melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) dengan perusahaan transportasi Huda Al-Hijaz dan Kayan Almashaer. Bus-bus ini akan beroperasi untuk mendukung mobilitas jemaah haji dan umrah di Arab Saudi.

Acara peluncuran berlangsung pada Rabu, 12 Maret 2025, di pool bus Huda Al-Hijaz yang berlokasi di Jummum, Makkah, Arab Saudi. Kegiatan ini menandai langkah strategis dalam pengelolaan keuangan haji melalui investasi langsung dalam ekosistem haji dan umrah yang dijalankan oleh BPKH melalui BPKH Limited. Dengan adanya unit-unit bus baru

ini, diharapkan mobilitas jemaah menjadi lebih lancar, aman, dan nyaman, seiring dengan meningkatnya jumlah jemaah yang datang setiap tahunnya.

Acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan haji dan umrah. Dari jajaran BPKH, hadir Anggota Dewan Pengawas BPKH, M. Dawud Arif Khan dan Mulyadi, serta Anggota Badan Pelaksana BPKH, M. Arif Mufraini. Selain itu, turut hadir Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA, serta Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, Dr. H. Nasrullah Jasam, Lc., M.A.

Tidak hanya itu, peluncuran ini turut dihadiri oleh berbagai perwakilan dari industri haji dan

umrah, termasuk penyelenggara perjalanan haji dan umrah ternama dari Indonesia. Di antaranya adalah Maktour Group, Arminareka Perdana, Koperasi ABM Amphuri Tisaga Multazam Utama, Alia Wisata, Asosiasi BERSATHU, serta konsorsium Go-Hajj. Kehadiran mereka mencerminkan sinergi yang kuat antara berbagai pihak dalam mendukung penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih efisien dan profesional.

Dalam sambutannya, Anggota Badan Pelaksana BPKH, M. Arif Mufraini, menyampaikan bahwa investasi ini merupakan bagian dari strategi BPKH untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi jemaah haji dan umrah. "Investasi ini bukan hanya menghadirkan fasilitas transportasi yang lebih modern,



tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung efisiensi dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kami berharap kehadiran bus-bus ini dapat memberikan manfaat langsung kepada jemaah serta menjadi bagian dari peningkatan kualitas layanan yang terus kami upayakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA, menekankan pentingnya transportasi yang andal dalam penyelenggaraan hajidanumrah. “Mobilitas jemaah adalah salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dengan hadirnya armada baru ini, kami berharap perjalanan jemaah dapat lebih nyaman dan efisien. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia dan memastikan mereka dapat beribadah dengan lebih nyaman,” ujarnya.

CEO Kayan Almashaer, Khaled Meshfer Al Hashlan, juga menambahkan bahwa kerja sama

ini akan meningkatkan efisiensi dalam mobilitas jemaah. “Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan transportasi yang berkualitas dan profesional. Dengan sinergi ini, kami yakin dapat menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan tepat waktu bagi jemaah,” ujarnya.

Chairman of Board of Director Huda Al-Hijaz, Abdulrahman Al-Ghamdi, turut memberikan

pandangannya terhadap kerja sama ini. “Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari

inisiatif luar biasa ini. Dengan pengalaman kami di sektor transportasi, kami akan memastikan bahwa seluruh bus yang dioperasikan memiliki standar tertinggi dalam hal keamanan dan kenyamanan. Kolaborasi ini adalah langkah maju dalam meningkatkan layanan transportasi bagi jemaah haji dan umrah, dan kami optimis terhadap manfaat jangka panjang yang akan dirasakan oleh para jemaah,” katanya.

Peluncuran bus ini diharapkan dapat menjadi model investasi yang berkelanjutan dalam sektor transportasi haji dan umrah, sekaligus mendukung tujuan strategis BPKH dalam meningkatkan pengelolaan dana haji dengan manfaat yang nyata bagi jemaah. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen BPKH Limited dalam menghadirkan solusi inovatif dalam layanan haji dan umrah, memastikan bahwa para jemaah mendapatkan pelayanan terbaik yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan logistik di Tanah Suci.





BALIK KERJA BARENG BPKH KEMBALI HADIR UNTUK 2.500 PEMUDIK

“Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 merupakan wujud komitmen BPKH dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat.”

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menggelar program kemaslahatan “Balik Kerja Bareng BPKH 2025”. Program ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Berkah Ramadhan 1446 H/2025 M yang bertujuan untuk mendukung masyarakat yang ingin kembali ke tempat kerja setelah merayakan Idulfitri atau Lebaran di kampung halaman.

Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya dan antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap program Balik Kerja BPKH dari tahun ke

tahun. Program ini dimulai sejak tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan kualitas layanan. Pada tahun ini, BPKH membuka rute baru yang mencakup wilayah Jawa Barat dan Pulau Sumatera.

“Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 merupakan wujud komitmen BPKH dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Melalui program ini, kami berharap dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta,” ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangannya pada





acara Press Conference Program Kemaslahatan Balik Kerja Bareng BPKH Tahun 2025, Senin (24/2) di Jakarta.

Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 akan memberangkatkan 58 bus eksekutif dengan kapasitas 40/45 seat atau dengan target 2500 orang. Peserta akan mendapatkan fasilitas berupa kaos, snack, dan makan. Titik keberangkatan program ini meliputi 5 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung.

Pendaftaran program ini dibuka untuk masyarakat umum dan komunitas yang kurang mampu dengan melampirkan bukti penghasilan (maksimal UMR Jakarta). Calon pendaftar wajib mengisi formulir dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan.

Pada kesempatan yang sama Anggota Badan Pelaksana BPKH Sullistyowati menyatakan program ini merupakan salah satu program kemaslahatan yang menggunakan hasil pengelolaan atau nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU) yang masuk ke dalam ruang lingkup Sosial Keagamaan.

Titik tujuan lokasi di Jabodetabek disebar untuk memudahkan para peserta menjangkau tempat tinggal terdekat, yaitu untuk wilayah Bekasi di Terminal Pulo Gebang, wilayah Jakarta Timur di Terminal Kampung Rambutan, wilayah Bogor di Terminal Baranangsiang dan wilayah Tangerang di Terminal Poris.

Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 akan dilaksanakan secara serentak pada Minggu, 6 April 2025 dan berkolaborasi dengan empat mitra kemaslahatan, yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM), Solo Peduli, LAZ Ummul Quro', dan DT Peduli.





BPKH BERSINERGI DENGAN PP MUHAMMADIYAH, KUATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI YANG BERKEADILAN

“Selain untuk menciptakan ekosistem haji yang berkeadilan, penguatan sistem juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada khususnya umat islam yang akan menitipkan dana haji mereka ke BPKH,”

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan kunjungan ke Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan dana haji agar semakin profesional, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat Islam di Indonesia.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah didampingi Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf, Harry Alexander dan

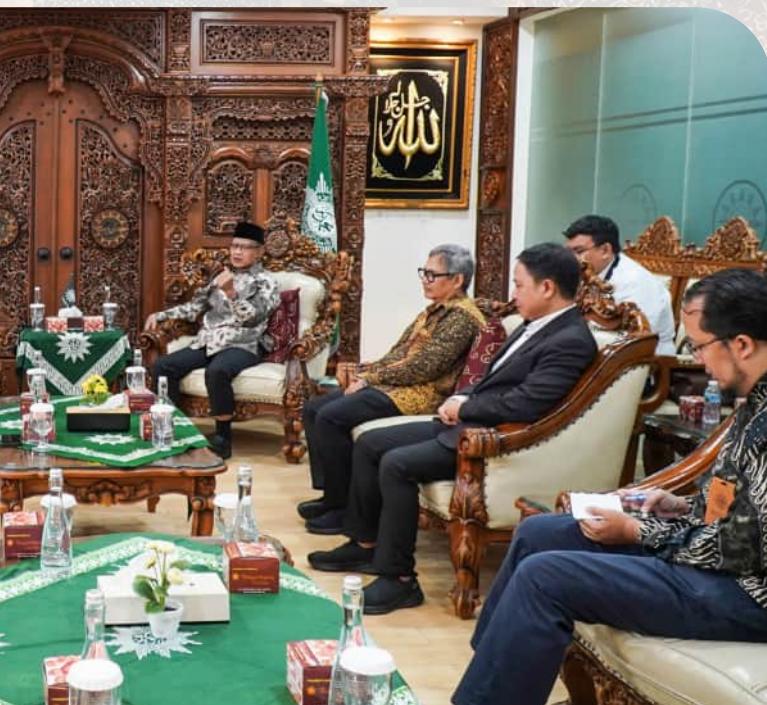
Arief Mufraini diterima dengan hangat oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir didampingi Bendahara Umum PP Muhammadiyah sekaligus Dirjen Haji dan Umroh Hilman Latief serta Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin.



Fadlul Imansyah dalam pertemuan ini menyampaikan harapannya agar Muhammadiyah dapat memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan pengelolaan dana haji yang lebih profesional dan diterima baik oleh masyarakat serta para pemangku kebijakan. "Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta membawa manfaat yang nyata bagi umat Islam di Indonesia," ujar Fadlul.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik kunjungan ini dan menekankan pentingnya pengelolaan dana haji secara produktif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menyoroti perlunya kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga BPKH dapat terus memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan Haji yang lebih adil. "Selain untuk menciptakan ekosistem haji yang berkeadilan, penguatan sistem juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya umat Islam yang akan menitipkan dana haji mereka ke BPKH," ujar Haedar.

BPKH berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola dana haji agar lebih profesional dan berkeadilan. Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi Islam seperti Muhammadiyah untuk memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan dana haji dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia.



BPKH TEGASKAN DANA HAJI AMAN DAN TRANSPARAN, NILAI MANFAAT 2024 LAMPAUI TARGET



Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menuturkan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan menjadi bentuk komitmen BPKH terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat.

“Kami menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik. Seluruh dana haji telah diinvestasikan secara hati-hati dan sesuai dengan regulasi. Alhamdulillah, nilai manfaat yang kami capai bahkan melebihi target,” ujar Fadlul dalam keterangannya Kamis (17/4).

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahun 2024 (*unaudited*), nilai manfaat dari investasi dan penempatan dana haji tercatat mencapai 101,02% dari target. Dari target sebesar Rp11,515 triliun, realisasinya mencapai Rp11,633 triliun. Capaian ini merupakan gabungan dari hasil pengelolaan investasi sebesar Rp9,29 triliun dan penempatan dana di bank sebesar Rp2,34 triliun.

Fadlul menjelaskan, sebagian dana memang harus selalu disimpan dalam bentuk penempatan di perbankan syariah yang likuid untuk menjaga kesiapan likuiditas minimum sebesar dua kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sesuai amanat Undang-Undang.

“Dana jemaah harus siap digunakan kapan saja. Karena itu, kami menyimpan sebagian dana dalam deposito dan instrumen jangka pendek yang aman,

minimal dua kali BPIH, yakni sekitar Rp40,7 triliun,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fadlul menegaskan bahwa strategi investasi BPKH tidak semata mengejar imbal hasil tinggi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan dan likuiditas dana.

BPKH juga terus menekan porsi penempatan dana di perbankan agar dana dapat lebih berkembang melalui instrumen investasi yang sesuai prinsip syariah. Pada 2024, porsi penempatan di bank syariah tercatat sebesar 23,75%, turun dari 24,97% pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, efisiensi anggaran operasional juga menjadi fokus BPKH. Sisa anggaran operasional akan dikembalikan ke Kas Haji dan dialihkan menjadi bagian dari dana kelolaan yang lebih produktif.

“Kami ini mengelola dana umat. Prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap syariah adalah prioritas utama. Di atas segalanya, kami menjaga amanah jemaah agar bisa berangkat haji dengan tenang,” tegas Fadlul.

Saat ini, laporan keuangan BPKH tengah dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selama enam tahun berturut-turut, BPKH berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangannya.



BPKH DISTRIBUSIKAN 152,4 JUTA SAR UNTUK BIAYA HIDUP JEMAAH HAJI 2025

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara resmi menyerahkan *banknotes* (uang tunai) dalam mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR) sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan *biaya hidup* bagi jemaah haji reguler 2025.

Hal ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII DPR RI yang menetapkan bahwa *biaya hidup* harus dikembalikan dalam bentuk mata uang SAR.

BPKH menyerahkan sebanyak 152,4 juta disiapkan untuk memenuhi kebutuhan 203.320 jemaah haji reguler. Masing-masing mendapatkan SAR 750 atau sekitar Rp 3.187.500 (SAR 4.250).

“Dana *biaya hidup* tidak hanya untuk kebutuhan harian jemaah, tetapi juga sebagai cadangan apabila terjadi kondisi darurat, serta membantu pembayaran dam atau *qurban*,” ucap Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf dalam keterangannya, pada Kamis (17/4).

Menurut dia, pengadaan *banknotes* tersebut merupakan bagian dari misi BPKH dalam memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji agar terus meningkat setiap tahun.



BPKH PERKUAT INVESTASI DANA HINGGA KE LUAR NEGERI

Prof. Dr. H. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si

Pada 26 Juli 2017, sejarah pengelolaan keuangan haji Indonesia menorehkan babak baru. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi mengambil alih fungsi pengelolaan dana jamaah haji dari Kementerian Agama, yang sejak lama juga bertindak sebagai penyelenggara, operator, dan regulator ibadah haji. Tujuh tahun berjalan, BPKH bercita-cita mewujudkan pengelolaan dana haji yang profesional, taat prinsip syariah, dan berdaya guna tinggi bagi umat.

Transisi dan Tugas Ganda Kementerian Agama
Meskipun urusan keuangan haji kini dipegang BPKH, peran Kementerian Agama tidak surut. Sebagai representasi pemerintah, Kemenag tetap merumuskan kebijakan, menetapkan akomodasi, katering, penerbangan, serta mengusulkan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada DPR. Kebijakan ini lahir melalui mekanisme legislasi—mulai dari UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah hingga persetujuan DPR setiap tahun.

Pertumbuhan Aset di Tengah Ketidakpastian
“Alhamdulillah, dana haji terus tumbuh,” kata

Prof. Dr. Muhammad Arief Mufraini Lc, MSi, Anggota Badan Pelaksana BPKH periode 2022–2027. Pada 2019, saldo mencapai Rp 124,3 triliun, kemudian naik menjadi Rp 144,9 triliun pada 2020, Rp 158,8 triliun pada 2021, dan Rp 166,5 triliun pada 2022. Pada 2023, aset sedikit meningkat menjadi Rp 166,7 triliun, sebelum akhirnya menembus Rp 178,03 triliun per Maret 2024.

Data ini mencerminkan berhasilnya strategi konservasi dan diversifikasi investasi BPKH, bahkan di tengah ketidakpastian pandemi dan pascapandemi. Data ini menegaskan upaya konservasi dan diversifikasi investasi di tahun-tahun pandemi dan pascapandemi.

Strategi Penempatan Dana: Aman, Syariah, dan Likuid

BPKH menerapkan lima prinsip utama: aman, syariah, berhati-hati, bernilai manfaat, dan likuid. Semua transaksi wajib sesuai syariah, dengan profil risiko rendah-sedang.

Dalam praktiknya, BPKH menempatkan 25 persen portofolio—setara Rp 40,67 triliun—pada instrumen yang memenuhi kriteria



syariah dengan peringkat minimal A, yang juga merepresentasikan sekitar 4,81 persen dari total aset perbankan syariah nasional. Sisanya, 75 persen atau Rp 122,49 triliun, diinvestasikan ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (96,3 persen) dan instrumen langsung serta lain-lain (3,7 persen).

“Prinsip likuiditas kami jaga dengan menyediakan dana minimal dua kali lipat kebutuhan pada musim haji,” ujarnya. Selain itu, sejak 2019 BPKH telah menyalurkan fasilitas pembiayaan syariah senilai Rp 1 triliun, termasuk investasi Tier 1 di Bank Muamalat dan Sukuk Subordinasi Tier 2. BPKH juga tercatat sebagai pemegang saham keempat terbesar di dunia pada Asia Pacific Islamic Funds (APIF) dengan modal disetor USD 10 juta.

Geliat Internasional: Jejak BPKH di Arab Saudi

Menjawab tantangan investasi lintas batas, BPKH mendirikan Syarikah BPKH Limited di Riyadh, memperoleh izin komersial pada 16 Maret 2023. Anak perusahaan ini bertindak sebagai *special purpose vehicle* untuk menanamkan modal pada 13 subsektor—dari transportasi, logistik, katering, hingga *artificial intelligence* dan layanan kesehatan. “Langkah ini memuluskan peran BPKH sebagai penjaga ekosistem perhajian global,” terang Prof. Mufraini.

Mekanisme Subsidi dan Beban Jamaah

Sejak terbitnya UU No. 8/2019, muncul istilah Bipih dan BPIH. Bipih adalah setoran yang dibayar jamaah, sementara BPIH mencakup total b i a y a

operasional haji. Nilai manfaat investasi BPKH rutin mensubsidi hingga 40–50 % ongkos haji. Tahun ini, rata-rata BPIH reguler sebesar Rp 93,41 juta per jamaah, namun yang dibayar hanya Rp 56,05 juta (60 %), sisanya Rp 37,36 juta (40 %) ditopang BPKH.

Variasi nilai manfaat setiap tahun, menurut Prof. Mufraini, “bergantung hasil investasi dan keputusan DPR—misalnya saat pandemi, subsidi meningkat karena hasil pengelolaan relatif kuat, meski kuota terbatas.”

Tantangan Antrean dan Reformasi Kebijakan

Antrean haji Indonesia terus memanjang: per Maret 2024 mencapai 5,38 juta calon jamaah reguler dan khusus, dengan waktu tunggu hingga puluhan tahun. Kondisi ini dipengaruhi kesepakatan Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1987, yang menetapkan kuota satu jamaah per seribu penduduk muslim. “Selain kuota, kita perlu percepat proses pendaftaran sejak usia muda—bisa mulai 12 tahun,” saran Prof. Mufraini.

Di level kebijakan, ia menekankan pentingnya sinkronisasi UU 8/2019 dan UU 34/2014 agar kerangka regulasi haji dan keuangan haji berjalan selaras. Penyesuaian setoran awal Bipih—saat ini Rp 25 juta—juga terus dikaji, meski keputusan

akhir tetap di tangan Kemenag, DPR, dan BPKH.

Rekomendasi untuk Semua Pihak

Bagi pemerintah dan DPR, harmonisasi regulasi menjadi kunci peningkatan kualitas layanan dan investasi haji. Masyarakat diimbau merencanakan pendaftaran sejak dini demi mengurangi beban antrean.

Sementara itu pelaku industri termasuk sektor kuliner dan logistik diharapkan menyiapkan kapasitas ekspor-impor yang dapat menunjang kebutuhan jamaah haji, mulai dari makanan siap saji hingga bumbu tradisional.

Tujuh tahun perjalanan BPKH menunjukkan kemajuan, namun tantangan investasi, subsidi, dan antrean tetap menanti penyelesaian. Sinergi antara regulasi, pengelolaan profesional, dan partisipasi masyarakat menjadi fondasi agar ibadah haji Indonesia kian terjamin dan berkualitas.

Prof. Dr. H. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si. merupakan Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang saat ini menjabat sebagai Anggota Badan Pelaksana BPKH Periode 2022-2027.

Setelah menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tahun 2000, ia menyelesaikan pendidikan magister di bidang ekonomi dan keuangan Islam di Universitas Indonesia tahun 2003 serta doktor di bidang Manajemen, Perbankan, dan Keuangan melalui sandwich program di Universitas Padjadjaran dan University of Kentucky-Lexington, Amerika Serikat tahun 2012. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Periode 2015-

2019 ini juga pernah mendapatkan program Summer School DAAD di University of Applied Sciences Amberg-Weiden, Germany tahun 2012 serta menjadi Dosen Tamu (Visiting Professor) di University of Rome-Italy tahun 2019.

Sebagai akademisi sekaligus praktisi, ia juga produktif menulis sejumlah buku dan artikel terpublikasi di berbagai jurnal. Ia misalnya menulis buku *Dana Haji Indonesia: Harapan dalam Paralogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah* (2021). Melalui pengalaman dan pemahaman yang luas di bidang ekonomi Islam, ia telah berkontribusi dalam berbagai program pendidikan, pengembangan, dan riset pengelolaan keuangan syariah di Indonesia.

IBADAH HAJI TANPA WORRY

INFORMASI KEUANGAN HAJI DALAM GENGAMAN





Assalamualaikum Haji Muda!

Perkenalkan yuk keluarga baru BPKH: anak perusahaan BPKH, yaitu

• شركه بي بي كي او اتش •

BPKH LIMITED

Untuk informasi lebih lanjut klik banner ini atau klik dan scan barcode berikut ini.

@bpkhr @bpkhr BPKH RI

www.bpkh.go.id






BPKH MEMFASILITASI UMKM GOES TO HAJJ UNTUK PENDAFTARAN HAJI DAN EKSPOR RENDANG KE TANAH SUCI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan “UMKM Goes to Hajj”, sebuah langkah strategis untuk mendorong peluang ekspor bagi pelaku UMKM.

Program ini

jug memberikan akses bagi pelaku UMKM dan memberikan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut mengajak group pengusaha perhotelan, retail, dan eksport impor di Arab Saudi, untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menegaskan komitmen BPKH dalam mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM. “UMKM dapat turut serta dalam ekosistem perhajian untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pasar yang lebih luas para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji” ujarnya.





Dalam kesempatan yang sama, Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI/ Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM, menekankan bahwa potensi produk Sumatera Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa. "PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia)" tambahnya.

Kepala Kanwil DJPb, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Satu Sumbar, Syukriah, menegaskan bahwa DJPb mendapatkan Amanah sebagai *Regional Chief Economic* (RCE) dan *Financial Officer* (FA) termasuk di Sumatera Barat. DJPb dalam hal ini diminta untuk menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa dan memberikan rekomendasi. Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu Bumbu dan Rendang, yang dimana industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatera Barat yang agraris.

"HIPERMI dibawah binaan DJPb Kemenkeu Prov. Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar" ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung program ini. "Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini," ujarnya.





KETIKA NASI OPOR MENEMBUS TANAH SUCI

Perjalanan Sunyi Misi Merah Putih di Balik Jutaan Porsi Makanan Haji

Diantara jutaan langkah yang bergerak perlahan menuju Arafah, tak ada yang tahu bahwa sebuah kisah panjang sedang berjalan di balik sekotak makanan yang diterima jemaah haji Indonesia. Sebuah kisah tentang asa, tentang nasionalisme, tentang kerja senyap anak-anak bangsa untuk membawa rasa Indonesia sampai ke Tanah Suci.

Semua bermula dari sebuah mimpi sederhana: menghadirkan rasa kampung halaman di tengah padang pasir Makkah. Mimpi itu perlahan disusun menjadi nyata, lebih dari lima tahun lalu, ketika sekelompok pengusaha Indonesia berusaha membawa makanan siap saji bercita rasa Nusantara ke Arab Saudi.

Rendang ayam dari Solo, nasi pulen dari Surabaya, semua sudah siap didistribusikan. Tapi, pada musim haji 2023, mimpi itu tergantung. Jutaan porsi yang sudah bertumpuk di gudang Makkah tiba-tiba dilarang edar, hanya karena sebagian kecil produk tidak

memenuhi standar konsumsi. Satu kesalahan kecil, membuat harapan besar seolah menguap begitu saja.

Namun, dari kegagalan itu lahirlah langkah-langkah baru yang lebih kuat. Pada Februari 2024, BPKH Limited, perusahaan yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia, resmi berdiri di Arab Saudi. Diam-diam, BPKH Limited mulai membangun ulang mimpi yang sempat retak. Dengan tekun mereka bertemu produsen makanan siap saji, berbicara dengan Kementerian Agama, Konsulat Jenderal RI, Kantor Urusan Haji Jeddah, hingga syarikah-syarikah lokal Arab Saudi. Bukan sekadar berjualan, tapi membangun ekosistem yang kokoh, agar mimpi tidak lagi berhenti di pintu gudang.

“ Makanan siap saji bukan hanya alternatif, tapi solusi di tengah kemacetan ekstrem saat puncak haji,”



sumber foto: istimewa

ujar Sidiq Haryono, Mudir BPKH Limited. "Kami ingin memastikan, meski jalanan tertutup, makanan Indonesia tetap sampai ke tangan jemaah."

Bukan tugas yang mudah. Harga makanan siap saji dianggap terlalu tinggi oleh banyak syarikah di Arab Saudi, sementara biaya konsumsi jemaah dibatasi pemerintah. Margin untung nyaris tak ada. Tapi, bagi BPKH Limited, ini bukan soal laba. Ini soal keadilan rasa. Ini tentang makna merah putih di Tanah Haram. Seleksi produsen pun dilakukan ketat. Puluhan sesi uji rasa digelar. Tak semua produsen mampu membuat nasi steril yang tetap pulen meski disajikan tanpa pemanas. Di balik itu, ada juga tantangan klasik: dokumen yang tertahan di pelabuhan, barang yang hampir ditolak. Tapi berkat koordinasi erat antara BPKH Limited, KJRI Jeddah, KUH Jeddah, dan KBRI Riyadh, satu per satu hambatan itu berhasil diselesaikan.

Puncak dari perjuangan ini tiba pada musim haji 2024. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua porsi makanan siap saji produksi Indonesia resmi disantap oleh seluruh jemaah haji Indonesia di Makkah. Tahun berikutnya, 2025, jumlah itu melonjak menjadi enam porsi untuk seluruh 203.320 jemaah haji reguler.

Dalam satu musim haji, tercatat sebanyak 1.219.920 porsi makanan—senilai lebih dari Rp 70,6 miliar—berhasil disalurkan. Setiap kotak nasi opor atau semur daging yang disantap di hotel-hotel Jarwal, Misfalah, Raudhah, dan Syisya membawa misi besar: mengembalikan keberkahan haji ke bangsa sendiri. "Ini lebih dari sekadar bisnis. Ini sejarah," tegas Iman Ni'matullah, Mudir BPKH Limited lainnya.

Misi Indonesia mengetuk pintu delapan syarikah besar di Tanah Suci pun menjadi babak baru perjuangan. BPKH Limited membawa lebih dari sekadar produk; mereka membawa rasa, membawa kehangatan kampung halaman. Dalam suhu panas ekstrem Arafah, Muzdalifah, dan Mina, enam jenis lauk siap saji Indonesia hadir di tengah kemacetan distribusi—

dengan kemasan steril, tahan setahun, siap santap kapan pun. Tanpa perlu khawatir makanan basi karena jalanan tertutup.

Melihat keberhasilan itu, pada awal 2025, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (DJPHU) Kementerian Agama RI, bersama BPKH Limited, langsung bergerak. Mereka membawa proposal makanan siap saji Indonesia ke hadapan delapan syarikah besar di Arab Saudi. Bukan dengan tangan kosong, tapi dengan seluruh kesiapan: rasa, mutu, harga, logistik, dan semangat bangsa.

Negosiasi berlangsung cepat. Hasilnya, lebih dari 1,3 juta porsi makanan siap saji dari Indonesia resmi dipesan untuk musim haji 1446 H/2025 M, khusus untuk masa puncak di Masyair. Nilai kontrak mencapai

Rp 60 miliar. Sebuah angka yang mencerminkan bukan hanya keberhasilan bisnis, tetapi martabat bangsa yang terangkat di Tanah Suci.

Dalam setiap kotak nasi yang disantap jemaah, tersimpan cerita panjang tentang diplomasi, tentang cinta tanah air, dan tentang dedikasi. Sama seperti ketika Presiden Soekarno dulu menanam pohon mindi di Padang Arafah—sebagai lambang cinta Indonesia kepada jemaah

dunia—hari ini anak-anak bangsa menanam jejaknya lewat cita rasa.

Tak banyak kamera yang mengabadikan proses ini. Tak viral di media sosial. Tapi di balik layar, dalam senyap, Indonesia membuktikan diri: hadir, mampu, dan memberi.

Semoga semakin banyak karunia dari Allah yang dapat dipersembahkan bangsa ini untuk dunia. Dan semoga setiap kotak nasi opor di tanah haram menjadi saksi kecil, bahwa cinta Indonesia bisa menembus batas-batas dunia.



sumber foto: Istimewa



RECONNECT & RECHARGE

Mempererat tali silaturahmi di Halal Bihalal BPKH 2025. M

Semoga langkah ki



ARGE SILATURAHMI 2025

Mari kita *reconnect* dan *recharge* semangat kebersamaan.
ta selalu diberkahi.



DANA HAJI TEMBUS RP171 TRILIUN, BPKH GELAR SOSIALISASI DI BANDUNG

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Komisi VIII DPR RI mengadakan sosialisasi keuangan haji di Bandung pada Sabtu (8/3).

Acara ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan keuangan haji serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Transparansi dan Pertumbuhan Dana Kelolaan BPKH

M. Dawud Arif Khan menjelaskan bahwa dana kelolaan haji Indonesia tumbuh positif dan melampaui target.

Hingga akhir 2024, total dana kelolaan BPKH mencapai Rp171,65 triliun, atau 101 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp169,95 triliun.

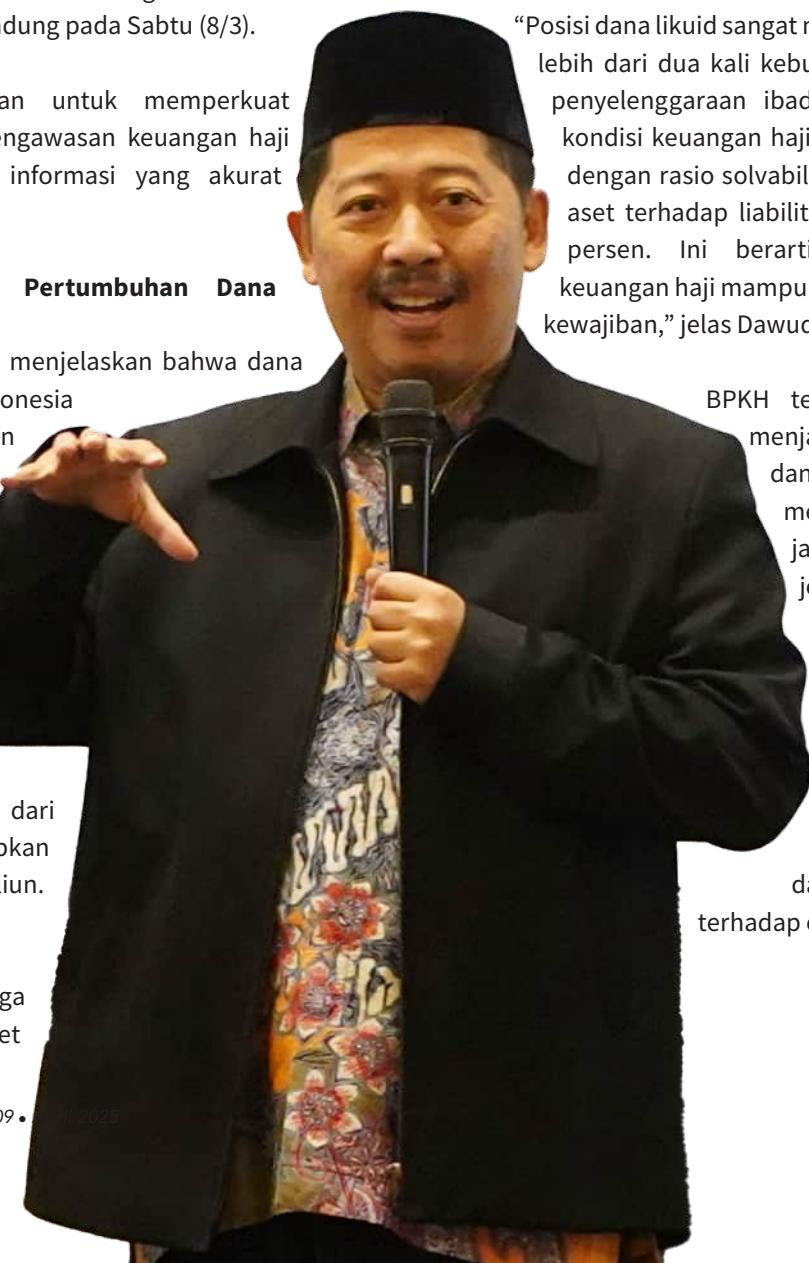
Rp11,52 triliun menjadi Rp11,56 triliun.

“Posisi dana likuid sangat mencukupi, bahkan lebih dari dua kali kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji. Saat ini, kondisi keuangan haji juga cukup solven dengan rasio solvabilitas (perbandingan aset terhadap liabilitas) sebesar 100,66 persen. Ini berarti nilai kekayaan keuangan haji mampu memenuhi seluruh kewajiban,” jelas Dawud.

BPKH terus berkomitmen menjaga keberlanjutan dana haji agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi jemaah.

BPKH juga telah membentuk BPKH Limited, yang menjadi bagian dari ekosistem haji dan berkontribusi terhadap efisiensi biaya haji.

Nilai manfaat juga meningkat, dari target





Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Pada kesempatan yang sama Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.

Menurutnya, hal ini diperlukan untuk memastikan dana umat digunakan secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap BPKH terus mengoptimalkan pengelolaan dana haji sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi jemaah. Selain itu, kami mendorong penguatan prinsip syariah dan kelembagaan, agar BPKH benar-benar dapat menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam pengelolaan dana haji yang adil serta mampu meringankan beban jemaah,” ujar Atalia.

Profil Jemaah Haji Jawa Barat dan Pentingnya Sosialisasi

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, menyampaikan bahwa kuota haji untuk Jawa Barat tahun ini mencapai

38.723 jemaah. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi keuangan haji, terutama bagi masyarakat Jawa Barat yang mayoritas jemaahnya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar.

“Diseminasi informasi mengenai keuangan haji menjadi sangat krusial. Kami berterima kasih kepada BPKH atas upaya mencerahkan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait pengelolaan dana haji,” tutup Dedi.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas BPKH M. Dawud Arif Khan, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, organisasi masyarakat Islam di Jawa Barat, penyuluhan agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta masyarakat.





Jika pendaftar haji wafat sebelum melaksanakan haji, jangan dibatalkan dulu! karena porsi haji dapat diwariskan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung, yang ditunjuk ataupun telah mendapat persetujuan semua ahli waris

Mengapa masa tunggu haji di Indonesia Begitu lama?



1. Kuota Per Negara dan Sistem MII



2. Perbandingan Kuota Haji di Negara Asean

NEGARA	Kuota	Masa tunggu
INDONESIA	221.000	26 - 48 tahun
MALAYSIA	33.000	Mencapai 149 tahun
BRUNEI	1.000	60 tahun
SINGAPURA	900	mencapai 34 tahun

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mendapatkan kuota yang lebih besar dibandingkan negara lain.

ALUR SETORAN PENDAFTARAN HAJI



1 Pembukaan Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH)



2 Setoran Awal Biaya Haji Rp 25 Juta



5 Pendaftaran di Kementerian Agama



4 Mendapatkan Nomor Validasi



3 Penandatanganan Akad Wakalah



6 Pengelolaan Dana oleh BPKH



7 Cek Nilai manfaat & dana kelolaan di BPKH APPS



Perbedaan BPIH, Bipih dan Nilai Manfaat dalam Penyelenggaraan Ibadah Hajji

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Hajji (BPIH) 2025 M / 1446 H

Dalam rapat kerja tersebut 6 Januari 2025, DPR RI dan Pemerintah meresmikan biaya haji 1446 H/2025 M, yang mencakup biaya penerbangan, akomodasi, biaya hidup, dan visa.



Trend Perkembangan BPIH dan BIPHIH 2010 - 2025





BPKH PERKUAT KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI DAN KOMITMEN PADA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat, sektor pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan di berbagai sektor, termasuk industri, ekonomi, dan teknologi, menuntut pendidikan tinggi untuk beradaptasi guna menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan pasar kerja global. Kurikulum pendidikan kini perlu disesuaikan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan relevan yang sejalan dengan perkembangan tren industri.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Dr. Mulyadi, S.E., M.M., M.Si., Akt., CA., CPMA., SAS., QIA, saat menjadi *keynote speaker* pada acara Internasional AppliedHE Xchange 2025 yang digelar Universitas Sebelas Maret (UNS) di Bali, Senin (24/2). Dalam



perekonomian Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara dengan ekosistem ekonomi syariah terbesar di dunia, tantangan ini semakin nyata.

“Sektor ekonomi syariah, termasuk keuangan dan perbankan Islam, terus tumbuh secara signifikan. Salah satu aspek penting dalam sektor ini adalah pengelolaan dana haji, yang berperan memastikan efisiensi dan keberlanjutan dana jamaah haji.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi di Indonesia perlu mempersiapkan lulusan dengan pemahaman mendalam tentang keuangan Islam, khususnya dalam pengelolaan dana haji,” tutur Mulyadi.

pidatonya, Mulyadi menyoroti peran penting sektor ekonomi syariah dalam

Saat ini, dana kelolaan BPKH telah mencapai angka Rp171 triliun dengan



tren pertumbuhan yang positif. Untuk mendukung pengelolaan dana haji yang berkelanjutan, BPKH terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak melalui sejumlah inisiatif strategis. Beberapa di antaranya adalah kemitraan dengan universitas dan lembaga penelitian, yang bertujuan menggali strategi keuangan terbaik dalam pengelolaan dana haji. BPKH juga menyediakan program magang bagi mahasiswa guna memberikan pengalaman langsung dalam praktik keuangan Islam. Selain itu, komitmen BPKH dalam mendukung pendidikan ditunjukkan melalui program beasiswa yang mereka sediakan.

Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret, Profesor Fitria Rahmawati, menyatakan apresiasi tinggi atas kontribusi BPKH terhadap pengembangan pendidikan. "Program-program yang diinisiasi BPKH, seperti penelitian, magang, dan beasiswa, sangat membantu universitas dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan industri, khususnya dalam

bidang keuangan syariah," ungkapnya.

Sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, BPKH, menurut Mulyadi, terbuka untuk berbagai bentuk kolaborasi lainnya. "Kami mendorong masyarakat untuk mendaftar haji dengan keyakinan bahwa dana mereka dikelola secara aman, sesuai prinsip syariah, dan memberikan manfaat luas bagi umat," tegasnya.

Sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, BPKH menurut Mulyadi terbuka untuk berbagai bentuk kolaborasi, termasuk penelitian, program magang, dan beasiswa. Dengan inisiatif ini, BPKH berupaya untuk mendorong lebih banyak masyarakat untuk mendaftar haji dengan keyakinan bahwa dana mereka dikelola secara aman, sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat yang luas bagi umat.



Aplikasi Mobile BPKH Virtual Account

Yuk #HajiMuda download aplikasi mobile BPKH Virtual Account di Play Store/App Store smartphone kamu untuk kemudahan akses informasi Pengelolaan Keuangan Haji.



Informasi Statistik Jumlah Pendaftaran Jemaah Haji

Informasi Jemaah Haji berdasarkan Provinsi di Indonesia

Cek Saldo Setoran Awal dan Nilai Manfaat VA

Infografis Informasi Instrumen Dana Haji

Berisi Informasi lengkap Dana Kelolaan Haji yang disajikan dalam bentuk infografis yang menarik dan mudah dipahami



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) MENGIRIMKAN 101 DA'I UNTUK MEMPERKUAT SYIAR ISLAM DI DAERAH 3T

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Selasa, (25/02) di Jakarta resmi melepaskan 101 Da'i yang kompeten, amanah, dan profesional untuk bertugas di 59 kabupaten/kota dan 30 provinsi di Indonesia, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Acara Pengiriman yang dilakukan secara luring dan daring ini merupakan bagian dari Program Dakwah Kemaslahatan BPKH 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi keagamaan di daerah yang minim akses terhadap pendakwah

Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati menyatakan Program Dakwah Kemaslahatan BPKH 2025 adalah wujud komitmen BPKH dalam mendukung pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia. "Kami berharap para Da'i yang bertugas dapat menjadi agen perubahan positif dan membawa manfaat bagi masyarakat di daerah 3T," ujar Sulistyowati.

Para Da'i yang dikirim telah melalui pelatihan intensif untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berdakwah di

masyarakat. Mereka juga dibekali dengan pemahaman tentang program-program BPKH, termasuk program "Semua Bisa Haji" dan "Ayo Haji Muda", yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunaikan ibadah haji sejak dini.

Program Dakwah Kemaslahatan BPKH 2025 merupakan salah satu program kemaslahatan yang menggunakan hasil pengelolaan atau nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU). Program ini merupakan bentuk tanggung jawab BPKH dalam mengelola dana umat secara amanah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk mendukung program ini agar dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," tutup Sulistyowati.

Program kemaslahatan ini melibatkan 5 mitra kemaslahatan BPKH yakni PPPA Daqu, NU Care LazisNU, Rumah Zakat, LAZ Persis dan Solo Peduli.





LAUNCHING BERKAH RAMADAN BPKH 2025

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan serangkaian kegiatan Ramadan 1446 Hijriah bertajuk “Berkah Ramadhan BPKH 1446 H / 2025 M : Menebar Manfaat, Menguatkan Umat” di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Minggu (16/3). Program ini merupakan wujud komitmen BPKH untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat melalui berbagai program Kemaslahatan selama bulan suci Ramadhan.

Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah Nazaroedin mengungkapkan setiap dana yang dikelola BPKH harus memberikan dampak sosial yang luas, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun dukungan terhadap kegiatan kemaslahatan umat. “Seluruh program yang kami jalankan ini adalah wujud transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana. Agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak oleh masyarakat,” ujar Firmansyah.

Sementara pada kesempatan terpisah Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan program ini mencakup 13 kegiatan, mulai dari distribusi mushaf Al-Quran (termasuk mushaf khusus untuk penyandang disabilitas), buka puasa bersama, pembagian sembako, hingga Pelatihan masjid dan revitalisasi masjid. “Selain mengelola dana haji, BPKH juga mendistribusikan hasil investasi dan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) untuk kemaslahatan umat,” ujar Fadlul.

Menteri Agama RI, Prof KH Nasaruddin Umar, mengapresiasi kontribusi BPKH dalam penguatan umat melalui program-program yang terukur dan pengelolaan keuangan haji dan Dana Abadi Umat yang transparan dan akuntabel. Ia berharap BPKH terus berkolaborasi dengan lembaga lain untuk

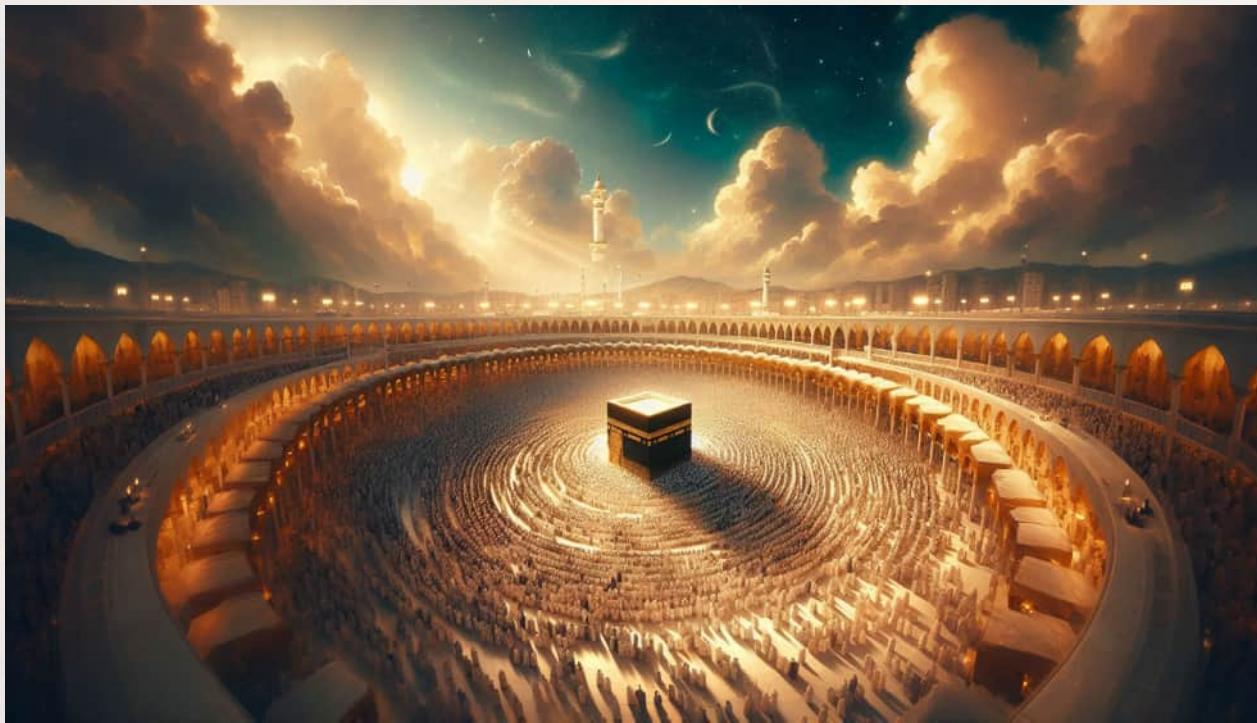
meningkatkan potensi umat.

13 program yang dijalankan BPKH dalam Program Berkah Ramadhan 1446 H adalah **20.000 Program Berbagi Mushaf Al-Quran Reguler, 1.000 Program Berbagi Mushaf Imam, 1.000 Program Berbagi Mushaf Isyarat, 1.000 Program Berbagi Mushaf Haji dan Umrah, 100 Program Berbagi Mushaf Braille, 1.000 Program Berbagi Iqro Braille, 8.600 Program Bingkisan Lebaran, 101 dai Program Dakwah Kemaslahatan ke seluruh Indonesia menjangkau ke 3T, Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025, Program Buka Puasa Bersama dan bingkisan Ramadhan, Program Pembersihan Masjid & Pelatihan Servis AC Masjid, Program Semarak Ramadan, Program Revitalisasi 12 Masjid di terminal dan Pelabuhan.**

Program ini menjadi bagian syiar Islam dan salah satu cara untuk memakmurkan bulan suci Ramadhan 1446 H. BPKH menggandeng 14 mitra kemaslahatan di seluruh Indonesia dalam penyaluran program ini, antara lain BAZNAS, RUMAH ZAKAT, DT PEDULI, DOMPET DHUAFA, LAZISNU, LAZISMU, PPA DAARUL QURAN, SOLO PEDULI, LAZ UMMUL QURO, BAITULMAAL MUAMALAT (BMM), BSI MASLAHAT, DEWAN MASJID INDONESIA (DMI), LAZ PERSIS, BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

BPKH terus berkomitmen menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) melalui program kemaslahatan sesuai dengan amanat UU 34 Tahun 2014. Tak hanya dalam ruang lingkup pelayanan ibadah haji, tapi juga pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, sarana-prasarana ibadah dan aksi tanggap bencana.

HAJI 2025, MOMEN PERTAMA MELIHAT MASJIDIL HARAM TANPA BAYANG-BAYANG KONSTRUKSI



Musim haji tahun 2025 mencatatkan sejarah baru bagi umat Islam di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya setelah lebih dari dua dekade, kawasan Masjidil Haram di Makkah kini tampil tanpa satupun *crane* (derek) yang biasa mendominasi pemandangan di sekeliling Ka'bah.

Ini bukan sekadar perubahan visual — hilangnya crane dari Masjidil Haram menandai berakhirnya salah satu proyek perluasan terbesar dalam sejarah Islam modern.

mengakomodasi jumlah jamaah haji dan umrah yang terus bertambah setiap tahunnya. Selama bertahun-tahun, puluhan crane raksasa menjadi bagian dari lanskap tetap di atas kompleks suci itu.

Akhir Sebuah Era Panjang Pembangunan

Sejak 2010, Masjidil Haram mengalami renovasi dan perluasan besar-besaran untuk

Kini, proyek perluasan itu hampir rampung, dengan lebih dari 95% pekerjaan telah selesai. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 15 tahun, jamaah dapat



menyaksikan keindahan Ka'bah tanpa bayang-bayang alat berat, mengembalikan suasana khusuk dan agung yang selama ini sedikit terganggu.

Mengingat Tragedi Crane 2015

Kehadiran *crane* di Masjidil Haram juga tidak lepas dari kenangan kelam. Pada 11 September 2015, sebuah crane jatuh akibat cuaca buruk, menyebabkan 111 jamaah wafat dan lebih dari 390 lainnya terluka. Tragedi ini menjadi salah satu momen paling menyedihkan dalam sejarah modern haji.

Sejak saat itu, perhatian terhadap keamanan proyek-proyek konstruksi di area suci menjadi semakin ketat. Dengan rampungnya sebagian besar proyek, kekhawatiran semacam itu kini mulai mereda.

Masjidil Haram: Lebih Luas, Lebih Modern

Selesainya proyek ini membawa banyak pembaruan penting. Area *thawaf* (mataf) kini jauh lebih luas, akses keluar-masuk lebih teratur, sistem pendingin ruangan diperbarui, dan fasilitas pendukung seperti eskalator, jalur khusus lansia, hingga sistem keamanan canggih telah diterapkan.

Semua ini bertujuan untuk

meningkatkan kenyamanan para jamaah, tanpa mengurangi kekhidmatan ibadah di pusat spiritual umat Islam tersebut.

Sebuah Musim Haji yang Penuh Makna

Musim haji 2025 menjadi momen yang sangat spesial: jamaah tidak hanya melaksanakan ibadah puncak rukun Islam kelima, tetapi juga menjadi saksi transformasi Masjidil Haram setelah puluhan tahun pembangunan.

Ka'bah yang kini berdiri megah tanpa *crane* di sekelilingnya menjadi simbol baru: bahwa setelah proses panjang, tibalah masa di mana Masjidil Haram siap menyambut umat Islam dengan wajah baru, lebih bersih, lebih lapang, dan lebih nyaman.

Musim haji 2025 bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga perjalanan sejarah — menandai era baru bagi tanah suci.

BUKA SUARA TUANG GAGASAN

Kami mengundang anda membuka suara, menuang gagasan. Tunjukkan pandangan, bergerak bersama lewat kata.

Redaksi menerima tulisan-tulisan :

1. Opini & refleksi
2. Tema sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya.
3. Karya orisinal yang belum pernah dipublikasikan.

kirimkan karyamu ke:
info@bpkh.go.id
atau
humas@bpkh.go.id

subjek: Judul Tulisan_Nama Anda



sumber foto: cottonbro studio



AMANAH MELAYANI UMAT

@bpkhri @bpkhri BPKH RI www.bpkh.go.id



Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No. Kav. 18, Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940